

**KLAIM ASURANSI KENDARAAN UMUM PADA
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENIMBULKAN
KERUGIAN TERHADAP PENUMPANG DAN KORBAN KECELAKAAN
DI LUAR KENDARAAN UMUM
(STUDI DI KABUPATEN MALANG)**

JURNAL ILMIAH

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

NICKY DARMAWAN

NIM. 0910110054



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS**

HUKUM

MALANG

2013

KLAIM ASURANSI KENDARAAN UMUM PADA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENIMBULKAN KERUGIAN TERHADAP PENUMPANG DAN KORBAN DI LUAR KENDARAAN UMUM.

Nicky Darmawan

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Email: darmawan1691@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan klaim asuransi kendaraan umum pada kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian terhadap penumpang dan korban di luar kendaraan umum. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dari banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di daerah kabupaten malang dari kecelakaan lalu lintas tersebut perlu adanya asuransi sosial akan tetapi dalam prakteknya pengeklaiman asuransi tersebut tidak berjalan dengan baik masih adanya pihak-pihak korban yang mengalami kesulitan dalam memperoleh santunan dari asuransi sosial tersebut dari permasalahan tersebut yang membuat penulis tertarik untuk menulis permasalahan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana tanggung jawab pihak jasa raharja dalam memberikan ganti kerugian terhadap penumpang dan korban kecelakaan di luar kendaraan umum?.(2) Apa kendala yang dihadapi oleh penumpang dan korban di luar kendaraan umum untuk memperoleh klaim dalam hal terjadinya kecelakaan dan bagaimana upaya untuk mengatasi kendala tersebut?. Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Penulis menggunakan data yang penulis peroleh dari PT Jasa Raharja (persero) baik secara langsung maupun tidak langsung. Data itu berupa wawancara terpinpin, data-data yang di perlukan yang di ambil dari pihak PT Jasa Raharja (persero). Data tersebut kemudian penulis analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Jawaban atas permasalahan yang ada bahwa tanggung jawab pihak jasa raharja ialah menghimpun dana dari masyarakat baik dana yang sesuai dengan Undang-Undang No 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang No 34 tahun 1964, dan tanggung jawab pihak jasa raharja yang lain adalah menyalurkan dana santunan asuransi kepada pihak-pihak korban yang terkait. Adapun kendala-kendala yang di hadapi oleh pihak korban untuk menerima dana santunan asuransi jasa raharja terdapat hambatan internal yaitu Hambatan yang timbul dalam pengelolaan PT Jasa Raharja (persero) Hambatan yang lainnya hambatan eksternal yaitu Hambatan eksternal mendasar adalah masih adanya korban kecelakaan lalu lintas yang belum berhasil mendapatkan santunan jasa raharja hanya dikarenakan korban bersalah oleh pihak PT Jasa Raharja dan tidak dijamin oleh UU No. 33 dan 34 Tahun 1964.

INSURANCE CLAIM OF PUBLIC TRANSPORT AGAINST TRAFFIC ACCIDENT WITH DISADVANTAGE FOR PASSENGER AND VICTIM OUTSIDE PUBLIC VEHICLE

(Study in Malang District)

Nicky Darmawan

Faculty of Law, University of Brawijaya

Email: darmawan1691@yahoo.co.id

ABSTRACT

The author highlights in this final paper the insurance claim of public transport against traffic accident with disadvantage for passenger and victim outside public vehicle. Theme is selected with the background of greater number of traffic accidents occurred in Malang District. Social insurance is needed to compensate the affected of these accidents but in practice, many victims find difficulty to obtain payment from social insurance. Therefore, the author has interest to explain this phenomenon.

Some problems are determined through this paper: (1) How is the responsibility of Jasa Raharja Company to compensate the disadvantage suffered by passenger and victim outside public vehicle? (2) What are the barriers faced by passenger and victim outside public vehicle in obtaining the claim against accident and how are the barriers dealt with? The writing of this paper uses sociological juridical method. Data are obtained from PT Jasa Raharja (Limited) through direct or indirect manners. Data collection technique is centralized interview with the representative of PT Jasa Raharja (Limited). Data analysis technique is qualitative descriptive.

The answers of these problems are as following. The responsibility of Jasa Raharja Company is to collect the funding from the community based on Act No.33 of 1964 and Act No.34 of 1964. Their other responsibility is to distribute the insurance payment to the related victims. The barriers faced by the victims in accepting Jasa Raharja insurance fund involve internal and external. The internal barriers include the close interdependence between the management of PT Jasa Raharja (Limited) and personnel and financial administration system, very few personnel with operational duty in the field especially to socialize Jasa Raharja, mandatory due collection, and the distribution of Jasa Raharja payment. External barriers involve the victimization of the victim by PT Jasa Raharja and the uncovered standing of the victim by Act No. 33 and 34 of 1964. It really constrains the relationship between the community and PT Jasa Raharja (Limited) and Traffic Police.

Key words : The insurance claim of public transport

A. PENDAHULUAN

Di dalam bidang transportasi, asuransi sangatlah diperlukan. Karena transportasi adalah suatu kebutuhan dimana setiap orang pasti mengawali aktifitasnya dari transportasi. Sehingga menyebabkan setiap orang pasti melalui tahapan transportasi sebelum menjalankan aktifitas lainnya. Terlepas dari berbagai resikonya, mau tidak mau mereka tetap menjalaninya. Baik itu resiko yang berasal dari diri sendiri maupun yang disebabkan oleh orang lain.

Pengguna kendaraan bermotor sudah selayaknya mendapat perlindungan, salah satunya ialah melalui asuransi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu asuransi Jasa Raharja. Pemerintah memang melindungi masyarakat dari kerugian akibat kecelakaan lalu lintas, melalui PT Jasa Raharja (Persero) santunan dibayarkan kepada anggota masyarakat yang mengalami kecelakaan atau musibah saat menggunakan kendaraan bermotor. Masyarakat berhak mendapat santunan jika terjadi kecelakaan saat perjalanan.¹

Asuransi kecelakaan angkutan umum merupakan bentuk asuransi yang diberikan kepada setiap penumpang yang sah yang menjadi korban sebagai akibat kendaraan bermotor umum atau alat angkutan penumpang umum yang ditumpangnya mengalami musibah kecelakaan selama dalam perjalanan dan asuransi kecelakaan umum.² Asuransi ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada setiap penumpang dan korban akibat kecelakaan lalu lintas yang di akibatkan oleh angkutan umum tersebut atas bahaya yang akan menimpahnya yang tujuannya adalah meringankan atau mengurangi beban para korban atau ahli warisnya. Angkutan merupakan alat mobilitas masyarakat yang efisienkhususnya pengangkutan penumpang. Peristiwa kecelakaan berulang-ulang terjadinya sehingga perlu meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, dari segi kemanusiaan para penumpang atau korban dari kecelakaan tersebut perlu di bantu biaya pengobatannya (luka-luka,

¹ ¹ <http://www1.surya.co.id/v2/?p=7731>, di akses tanggal 15 Desember

² Prof. Abdulkadir Muhamad, S.H. **Hukum Asuransi Indonesia**. PT Citra Aditya Bhakti. Bandung. 2006. hal 205

cacat) dan pemberian santunan kepada korban yang meninggal. Atas dasar tanggung jawab moral Pemerintah terhadap korban maka dibentuklah suatu pertanggungan satu-satunya jalan untuk mengalihkan sebahagian atau seluruh resiko yang menimpah manusia.

Dalam pelaksanaan pertanggungan tersebut, pemerintah memberi kepercayaan kepada PT. Jasa Raharja (Persero) mengelola dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang sekaligus sebagai penyelenggara. Pelaksanaan asuransi kecelakaan penumpang bus pada dasarnya setiap penumpang yang mengalami kecelakaan lalu lintas dalam bentuk korban meninggal, luka-luka, cacat tetap, berhak mendapatkan dana santunan kecelakaan penumpang ataupun ganti kerugian. Oleh karena itu Negara melalui PT Jasa Raharja (Persero) memberikan jaminan perlindungan berupa santunan asuransi jasa raharja yang besarnya antara lain :

1. Korban meninggal dunia sebesar Rp. 25.000.000
2. Korban cacat tetap sebesar Rp. 25.000.000
3. Korban luka berat sebesar Rp. 10.000.000
4. Biaya penguburan sebesar Rp. 2.000.000.

Disebabkan adanya peralihan resiko oleh pengusaha angkutan atas penumpangnya kepada pihak asuransi dengan adanya pengutipan baik Iuran Wajib dari setiap penumpang yang disetor ke PT. Jasa Raharja (Persero) setiap bulannya ataupun Sumbangan Wajib dari para pemilik kendaraan bermotor yang dibayar pada saat pendaftaran atau perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan setiap tahunnya. Untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan permintaan atas haknya PT Jasa Raharja (Persero) menyediakan formulir kecelakaan, formulir itu diisi oleh petugas Jasa Raharja setelah mendapatkan laporan polisi, kemudian ditandatangani.³

Aktifitas transportasi yang ada di seluruh wilayah Indonesia relatif padat, khususnya di Kabupaten Malang. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Mayoritas penduduk Malang adalah pendatang, baik itu pekerja maupun pelajar. Dengan demikian terjadi sebuah peningkatan perekonomian dan

³ Ibid Hal 207

kesejahteraan, sehingga tingkat mobilitas akan meningkat pula, baik orang maupun barang.

Dengan tingginya aktifitas transportasi yang ada di Kabupaten Malang dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas terutama kendaraan umum jenis bus yang sering terjadi kecelakaan di sepanjang jalan yang berada di Kabupaten Malang. Banyak hal-hal yang memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas kendaraan umum tersebut hal ini antara lain pengemudi mengendarai kendaraan tersebut secara ugal-ugalan, memang jika kita melihat di sepanjang jalan yang berada di Kabupaten Malang rawan sekali terjadi kecelakaan sehingga menyebabkan korban, baik korban penumpang bus maupun korban di luar kendaraan bus tersebut. Hal tersebut dapat kita lihat dalam daftar kecelakaan lalu lintas kendaraan umum yang diambil selama periode Bulan Januari sampai Bulan Maret 2012 di kantor polisi lalu lintas di Kabupaten Malang dan PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Malang yaitu:

Tabel Rekapitulasi Data Kecelakaan Lalu Lintas yang diambil dari Kantor
Polisi Lalu Lintas (Kabupaten Malang)

No	Bulan	Jumlah Korban		
		MD	LB	Jumlah
1	Januari	20	74	94
2	Februari	8	70	78
3	Maret	10	78	88

Tabel Rekapitulasi Data Kecelakaan Lalu Lintas yang diambil dari PT. Jasa Raharja
(Persero) Perwakilan Malang (Kabupaten Malang)

No	Bulan	Jumlah Korban		
		MD	LB	Jumlah
1	Januari	15	68	83
2	Februari	7	64	71
3	Maret	10	75	85

Catatan: MD= Meninggal dunia LB= Lua Berat

Dari kedua sumber yang berbeda antara kantor polisi lalu lintas di kabupaten malang dengan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Malang jelas sekali adanya perbedaan jumlah korban yang memenuhi syarat Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964. Namun demikian masih banyak ditemukan hambatan dalam proses kepengurusan hak atas santunan asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) tersebut. Hambatan-hambatan yang terkesan menyulitkan korban atau ahli waris korban, sehingga masih banyak korban atau ahli waris korban yang tidak mendapatkan haknya atas santunan yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Berawal dari persoalan tersebut diatas maka penulis berusaha mencari tahu, sejauhmana tanggungjawab PT Jasa Raharja (Persero) dalam menyalurkan santunan kepada korban atau ahli waris korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Hal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan menjadi menarik untuk dibahas di dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu berdasarkan kajian di atas saya mempunyai keinginan untuk menulis skripsi dengan judul **KLAIM ASURANSI KENDARAAN UMUM PADA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENIMBULKAN KERUGIAN TERHADAP PENUMPANG DAN KORBAN DI LUAR KENDARAAN UMUM.**

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimana tanggung jawab pihak jasa raharja dalam memberikan ganti kerugian terhadap penumpang dan korban kecelakaan di luar kendaraan umum.
2. Apa kendala yang dihadapi oleh penumpang dan korban di luar kendaraan umum untuk memperoleh klaim dalam hal terjadinya kecelakaan dan bagaimana upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

C. METODE

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah Yuridis Sosiologis Penulis meneliti dari sumber data primer, sekunder, dan tersier, berupa wawancara dengan pihak korban yang terkait dan petugas dari PT Jasa Raharja (persero) , Undang-

Undang No 33 tahun 1964 tentang asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas jalan. Data yang telah penulis dapatkan tersebut kemudian diolah untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah. Tahap akhirnya yaitu dilakukan penulisan akan hasil penelitian.

D. PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab PT Jasa Raharja (Persero) Dalam Menghimpun Dana dari Masyarakat

Tanggung jawab PT Jasa Raharja (Persero) melakukan pemupukan dana-dana dari masyarakat pengguna sarana angkutan umum dan pengusaha/pemilik kendaraan yang selanjutnya dapat dinventarisasikan dan diputuskan dalam suatu badan Pemerintah yaitu suatu Perusahaan Negara, yang harus mengadministitrir dana-dana tersebut dengan baik, sehingga terjaminlah kedua tujuan dari pemupukan dana-dana tersebut, yaitu :

1. Untuk sewaktu-waktu dapat menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan;
2. Tetap tersedianya “*investible-funds*” yang dapat dipergunakan oleh Pemerintah untuk tujuan produktif yang non-*inflatoir*.

Oleh sebab itu PT Asuransi Jasa Raharja (Persero) mengemban tanggung jawab memupuk keuangan dari masyarakat melalui iuran wajib dan sumbangan wajib dan selanjutnya menyalurkannya kembali melalui santunan asuransi jasa raharja terhadap korban/ahliwaris korban yang mengalami kecelakaan di jalan raya.

1.1 Jasa Raharja Menghimpun Dana Asuransi Sesuai Dengan UU No 33 Tahun 1964.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 dengan tegas Pasal 10 ketentuan mengenai saat terjadinya kecelakaan. lalu lintas telah ditetapkan ketentuan mengenai Dalam hal kendaraan bermotor

umum antara saat penumpang naik kendaraan yang bersangkutan ditempat berangkat dan saat turunnya dari kendaraan tersebut di tempat tujuan. Pasal tersebut diatas bahwa PT Jasa Raharja (Persero) menjamin pertanggungungan bagi penumpang yang masih di dalam kendaraan angkutan dan jika terjadi kecelakaan lalu lintas maka kepadanya berhak atas santunan jasa raharja.

Sumber pertanggungungan oleh PT Jasa Raharja (Persero) dana tersebut dihimpun melalaui Pasal. 3 ayat (1) Iuran wajib harus dibayar bersama dengan pembayaran biaya pengangkutan penumpang kepada pengusaha alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan. Ayat (2) Pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan wajib memberi pertanggungjawaban seluruh hasil pungutan iuran wajib para penumpangnya dan menyetorkannya kepada Perusahaan, setiap bulan selambat lambatnya pada tanggal 27 secara langsung atau melalui Bank ataupun Badan Asuransi lain yang ditunjuk oleh Menteri menurut cara yang ditentukan oleh Direksi Perusahaan.

Namun demikian dalam prakteknya ternyata ketentuan undang-undang diatas beserta PP nya dalam kaitannya dengan pemupukan dana melalui iuran wajib dengan bersamaan pembayaran karcis atau tiket tidak dapat di laksanakan, karena berbagai hambatan baik terbatasnya personil PT Jasa Raharja (Persero) ataupun terlalu sangat sulit diterapkan. Oleh sebab itu dengan cara bekerja sama dengan pihak pengusaha selanjutnya dengan cara borongan yaitu : Bus besar sebesar Rp. 125.000,- sedangkan Mini bus antar kota sebesar Rp. 75.000,-. Akhirnya pihak pengusaha angkutan umum menyetorkan kepada PT Jasa Raharja (Persero) selambat-lambatnya setiap tanggal 27 dalam setiap bulannya. Keuntungan yang di dapat PT Jasa Raharja (Persero) efektif dan efisien sedangkan kerugiannya penyeteroran tidak bisa pasti dalam jumlah yang ditentukan karena alasan

kendaraan angkutan umum tersebut mengalami kerusakan dan tidak melaksanakan kegiatan operasi.⁴

1.2 PT. Jasa Raharja (Persero) Menghimpun Dana Asuransi Sesuai Dengan UU no 34 Tahun 1964.

Undang-undang no 34 tahun 1964 pasal 2 menyebutkan:

1. Menegaskan sumber dana adalah sumbangan wajib bagi Pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diharuskan memberi sumbangan wajib setiap tahun kepada dana yang dimaksud dalam pasal 1. Dana ialah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib, yang dipungut dari para pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan dan yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan korban atau ahli waris yang bersangkutan.
2. Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah

Pasal 4 :

- a. Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan tersebut dalam pasal 1. dana akan memberi kerugian kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- b. Untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban menurut ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah, yang dianggap perlu.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka setiap sumbangan wajib dibayarkan kepada PT Jasa Raharja (Persero) setiap tahun sekali melalui SAMSAT Kabupaten/Kota, bersamaan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Cara Pembayaranannya menjadi satu dengan seluruh kewajiban atas perbaharuan Surat Tanda Nonor Kendaraan (STNK) pada setiap SAMSAT Kabupaten/Kota. Sehingga tidak mungkin pemupukan dana sumbangan tersebut sebagai mana ditegaskan dalam Undang undang No. 34 Tahun 1964 Pasal 3 atau disebutkan pada setiap akhir bulan juni.

⁴ Hasil wawancara narasumber H.M Sudarto Kepala perwakilan jasa raharja malang. Wawancara diambil tanggal 28 Desember 2012.

Oleh sebab itu pasal ini sangat lemah dan tidak bisa dilaksanakan karena tidak sesuai dengan kondisi lapangan atas kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku pembayaran sumbangan wajib di bayar pada setiap tahun akhir masa STNK berlaku di setiap SAMSAT Kabupaten/kota. Selanjutnya mengenai besarnya sumbangan wajib ditegaskan dalam Peraturan pemerintah No. 18 Tahun 1965, Pasal 2 ayat (1) Tiap pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diwajibkan memberi sumbangan setiap tahunnya untuk dana kecelakaan lalu lintas jalan. Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan oleh Menteri menurut suatu tarip yang bersifat progresif. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 416/KMK.06/2001 tentang Penetapan santunan dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan Pasal. 3 ayat (2).

2. PT. Jasa Raharja (Persero) Sebagai Penyalur Dana Asuransi Terhadap Korban Kecelakaan Di Jalan Raya.

Obyek dari asuransi kecelakaan adalah manusia. Asuransi ini memberikan jaminan terhadap kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan. Kerugian yang timbul dari kecelakaan dapat berupa meninggal, cacat sementara, cacat tetap, biaya pengobatan dan perawatan rumah sakit.⁵

PT Jasa Raharja (Persero) mengemban amanat UU No. 33 dan 34 Tahun 1964 dan sekaligus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah Menteri Keuangan Republik Indonesia adalah dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai akibat dari kecelakaan kecelakaan yang terjadi. Jaminan Perlindungan setiap warga negara oleh negara, jaminan terhadap keselamatan penumpang ditutup asuransinya. Di Indonesia, jaminan diberikan oleh perusahaan asuransi

⁵ Agus Prawoto, 2003, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk BaseCapital (RBC)*, BPFE, Yogyakarta, hal. 78

jasa raharja. Premi atau santunan asuransi jasa raharja ditentukan sepihak oleh penanggung Premi dipungut dari Iuran Wajib (IW) ditambahkan kepada harga karcis penumpang dan Sumbangan Wajib (SW) ditambahkan ketika membayar pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun. Premi yang dipungut selanjutnya di setor kepada penanggung (PT Jasa Raharja (Persero)).⁶

PT Jasa Raharja (Persero) dalam menyalurkan pembayaran santunan jasa raharja sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 33 dan 34 Jo. PP No. 17 dan 18 Tahun 1965 selama 3 bulan terhitung bulan januari sampai dengan maret 2012 di kabupaten malang adalah sebagai berikut:

Tabel Penyaluran Dana Jasa Raharja Periode Januari sampai dengan Maret 2012⁷

No	Sifat Cedera	Korban	Santunan
1.	Meninggal Dunia	26	Rp 650.000.000
2.	Luka-luka	109	RP 674.000.000
3.	Cacat Tetap	0	0
4.	Penguburan	0	0
Total		135	Rp 1.324. 000.000

Sumber Data Primer PT Jasa Raharja (Persero) Cabang malang yang diolah.

Dari hasil penyaluran dana santunan yang telah di keluarkan oleh pihak Jasa Raharja ternyata hanya 26 korban meninggal dunia dan 109 korban luka-luka yang telah dibayarkan, akan tetapi jika kita lihat dari banyaknya jumlah korban yang terhitung dari bulan januari sampai dengan maret 2012 dengan perincian 32 korban meninggal dunia dan 207 korban luka-luka. Dari data tersebut terdapat 6 korban meninggal dunia dan 98 korban luka-luka yang belum mendapatkan santunan. Hal tersebut terjadi di karenakan adanya hambatan-hambatan dalam proses pengklaiman yang di alami oleh pihak-

⁶ H. Abbas Salim, 1998, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 90

⁷ Data penyaluran pembayaran dana Santunan Asuransi Jasa Raharja bulan januari s/d maret 2012 perwakilan malang

pihak korban kecelakaan yang sesuai dengan kriteria undang-undang No 33 tahun 1964 tentang dana pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang dan undang-undang no 34 tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan.

PT Jasa Raharja (Persero) cenderung memperhatikan kecelakaan yang bersifat kolektif contohnya yang sesuai dengan undang-undang no 33 tahun 1964 pada kecelakaan bus Puspa Indah faktor penyebab kecelakaan tersebut adalah salah satunya faktor kelalaian yang dilakukan oleh supir bus setelah menyalip sebuah truk pada belokan menikung bus Puspa Indah tak bisa kembali ke lajur kiri karena selip, kondisi jalan yang licin akibat hujanpun membuat supir bus kesulitan mengendalikan bus dan akhirnya masuk jurang, selain itu kecelakaan juga diakibatkan karena kurangnya penerangan jalan dalam kecelakaan tersebut menimbulkan 3 korban luka parah, dan 2 korban rawat inap.

Dalam kecelakaan tersebut, salah satu dari korban kecelakaan tersebut yaitu Sulikah yang menjadi korban kecelakaan yang mengakibatkan luka parah dibagian dahi, dan pipi kanan memaparkan bahwa dia belum mendapatkan dana asuransi dari pihak jasa raharja dikarenakan menurutnya proses yang terlalu sulit dan berbelit-belit untuk mendapatkan dana asuransi tersebut. Selain itu, ketidaktahuan korban kecelakaan lalu lintas yang terbatas mengakibatkan proses dan mekanisme penyaluran dana asuransi menjadi terhambat.⁸ Melihat dari kasus Sulikah, penulis melakukan konfirmasi terhadap pihak jasa Raharja dan menemui data-data yang belum valid terhadap korban kecelakaan lalu lintas yaitu Sulikah. Setelah melakukan konfirmasi terhadap bagian keuangan dan umum yaitu Bapak Santosa beliau menjelaskan 'korban mengalami kesulitan pada kelengkapan administrasi sehingga terhambatnya pencairan dana asuransi bagi korban'.

Dan contoh kecelakaan lalu lintas yang dijamin oleh jasa raharja yang memenuhi atau yang sesuai dengan undang-undang no 34 tahun 1964 adalah

⁸ Hasil wawancara korban kecelakaan lalu lintas, Sulikah. Data diambil pada tanggal 24 Desember 2012

sebagai berikut pada tanggal 17 Maret 2012 terjadi kecelakaan lalu lintas di JL. RY Dr. Cipto kecamatan Lawang kabupaten malang KM 72-73 terjadi kecelakaan lalu lintas yang kronologisnya bus yang melintas di jalan tersebut menabrak atau menyegol dari samping pejalan kaki yang mengakibatkan luka berat yang menimpa Siti nur arifah dharma putri yang berumur 13 tahun warga Jl. Dr cipto rt 02 rw 03 desa bedali kecamatan lawang kabupaten Malang. Dari kecelakaan tersebut keluarga korban mengaku kesulitan mendapatkan dana asuransi jasa raharja di karenakan adanya ketidak lengkapan data administrasi yang mengakibatkan terhambatnya penyaluran dana asuransi tersebut.

Setelah korban atau ahli waris korban memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud oleh Undang-undang No. 33 dan 34 tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah No. 17 dan 18 tahun 1965 dari Kepolisian Lalu Lintas, persyaratan kelengkapan tersebut di bawa kepada PT Jasa Raharja, untuk selanjutnya di cek dan diteliti. Persyararatan tersebut layak untuk mendapatkan dan dinyatakan lengkap maka pihak korban atau ahli waris korban diperintahkan menunggu dan selanjutnya menerima santunan jasa raharja melalui kasir berwujud uang tunai sesuai dengan ketentuannya.

Namun jika persyaratan dinyatakan tidak lengkap atau karena persyaratannya kurang lengkap maka pihak (korba/ahli waris korban) masih diberikan kesempatan untuk melengkapi jika kurang lengkap, namun jika tidak berhak menurut dan berdasarkan undang-undang tersebut korban atau ahli waris untuk mengajukan permohonan bantuan sosial.

3. Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Penumpang dan Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Luar Kendaraan Umum Untuk Memperoleh Klaim Asuransi pada PT Jasa Raharja (Persero)

1. Kendala Dan Hambatan Internal

Hambatan yang timbul dalam pengelolaan PT Jasa Raharja (persero) adalah berkaitan erat dengan sistem administrasi personil dan keuangan. Sangat minimnya personil yang menjalankan tugas operasional di lapangan khususnya yang bergerak dibidang pola sosialisasi jasa raharja, penarikan iuran wajib dan penyaluran santunan jasa raharja. Dalam hal sosialisasi dan pelayanan keselamatan, yang berkaitan dengan pemasangan rambu-rambu peringatan dan berkaitan dengan anggran terjadi keterbatasan dan pro kontra dalam intern perusahaan itu sendiri terbukti rambu rambu terpasang oleh jasa raharja sangat minim sekali. Selanjutnya yang berkaitan dengan penyaluran santunan jasa raharja, PT Jasa Raharja (Persero) sebagai lembaga pertanggungungan yang bersifat sosial terkesan belum ikhlas dan tulus.

Contohnya yang terjadi di PT Jasa Raharja kantor perwakilan Malang kelemahan di bagian administrasi dan keuangan dalam proses klaim asuransi ibu Sulikah korban kecelakaan bus puspa Indah yang mengalami luka parah pada bagian wajahnya yang timbul beberapa hambatan dalam proses pencairan dana santunan asuransi jasa raharaja yang terkesan berbelit-belit dari penanganan kasus berkas perkara di kepolisian sampai dengan jasa raharja⁹. Hal in menyebabkan kesulitan administrasi untuk kelengkapan proses atau mekanisme keluarnya dana santunan jasa raharja. Menurut keterangan Bapak Santosa Ibu sulikah belum melngkapi kelengkapan administrasi yaitu kwitansi-kwitansi yang sah dari rumah sakit dan proses laporan dari kepolisian yang belum lengkap Dari pernyataan ibu sulikah dan keterangan dari pihak Jasa Raharja tersebut muncul anggapan bahwa lemahnya penanganan proses klaim asuransi jasa raharja yang kurang tepat dan komprehensif timbul beberapa pertanyaan terhadap jasa raharja yang tidak sesuai dengan tujuan dari jasa raharja tersebut. Seharusnya korban mendapatkan pelayanan yang tidak berbelit-belit atau petugas jasa raharja membantu korban dengan tulus agar tercapainya tujuan dari jasa raharja yang tepat sasaran.

⁹ Hasil wawancara dengan ibu sulikah . data diambil pada tanggal 24 desember 2012

Emmy Pangaribuan Simajuntak menyatakan dalam bukunya “ Tujuan dari pertanggungans sosial (*sosial insurance*) adalah untuk menyediakan sesuatu bentuk jaminan tertentu kepada seseorang atau anggota masyarakat yang menderita kerugian dalam memperjuangkan hidupnya dan keluarganya “¹⁰. Dengan demikian maka PT Jasa Raharja (Persero), dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga pertanggungans yang bersifat sosial harus ikhlas dan tulus serta mementingkan kepada penderitaan rakyat (korban/ahli waris korban). Bila dilihat dari pemupukan dana iuran dan sumbangan wajib kiranya cukuplah meningkat, namun disini adalah mental personil penyelenggara PT Jasa Raharja (persero) perlu untuk di evaluasi kinerja personilnya berkaitan dengan latar belakang, kedudukan pendidikan dan tugas tanggung jawabnya. Hubungan ketidak harmonisan antar personil ini terbukti dalam kaitannya dengan anggaran operasional dalam tubuh PT Jasa Raharja (Persero). Contoh dalam pelaksanaan operasional dan sosialisasi penarikan iuran wajib bagi pengusaha angkutan yang tidak sehat atau kendala lain, serta sosialisasi jasa raharja tentang pola keselamatan di jalan raya. Kondisi seperti ini Pimpinan Cabang segera mengambil langkah konkrit agar tidak berlangsung terus, akibatnya akan melemahkan Perusahaan itu sendiri. Seharusnya sosialisasi dilakukan dengan cara terpadu dan berkala bukan secara parsial dan sendiri-sendiri contoh saat lebaran saja, namun rutin. Pemasangan rambu-rambu perlu lebih banyak lagi, oleh sebab itu pernyataan Emmy di atas penulis setuju dan sampai saat ini pelayanan baik penyaluran santunan jasa raharja ataupun sosialisasi tugas dan tanggung jawab PT Jasa Raharja terkesan sangat lemah dan jauh dari publikasi media cetak ataupun elektronik, sehingga beranggapan bahwa PT Jasa Raharja (persero) sangat baik dan solid Sehingga tujuan PT Jasa Raharja (Persero) bukan hanya sebagai pertanggungans sosial secara mutlak tetapi perlu juga di cermati dampak sosial masyarakat yang memperjuangkan kehidupannya berkaitan dengan ekonomi

¹⁰ Emmy Pangaribuan Simajuntak, 1980, *Hukum Pertanggungans dan Perkembangannya*, Yogyakarta, Seksi Hukum Dadang Fakultas Hukum UGM, hal. 106

yang semakin sulit dewasa ini. PT Jasa Raharja (Persero) tidak transparan dalam pemupukan dana terhimpun dari iuran wajib dan sumbangan wajib atas Undang-undang No. 33 dan 34 Tahun 1964. Sebagai perusahaan yang mendambakan menjadi perusahaan terkemuka di bidang asuransi dengan mengutamakan penyelenggaraan program asuransi sosial dan asuransi wajib sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Konsep ini masih jauh dari kemauan dan keinginan masyarakat. PT Jasa Raharja (Persero) khususnya Cabang perwakilan Malang belum pernah mengumumkan berapa jumlah terhimpun dana dari masyarakat untuk setiap tahunnya dan bagaimana penyaluran dana tersebut.

2. Kendala dan Hambatan Eksternal

Hubungan dengan pihak pemerintah daerah dari tingkat pusat sampai pada tingkat operasional masih dirasa belum optimal, khususnya antar personil pelaksanaan lapangan dan operasional. Pemeriksaan oleh akuntan publik, atau badan lain independent yang berhak, agar terjadi transparansi, jujur dan adil. Hubungan dengan para pengusaha angkutan umum juga sangat lemah, khususnya dalam hal kontrol penerimaan iuran wajib. Hubungan dengan pihak, Dinas Perhubungan Darat, Dinas Kesehatan dengan program Pertolongan Pada kecelakaan (P3K) atau penyuluhan dan pemeriksaan sopir angkutan umum jarak jauh juga sangat lemah, sehingga kecelakaan dari tahun ke tahun semakin bertambah banyak.

Hambatan eksternal mendasar adalah masih adanya korban kecelakaan lalu lintas yang belum berhasil mendapatkan santunan jasa raharja hanya dikarenakan korban bersalah oleh pihak PT Jasa Raharja dan tidak dijamin oleh UU No. 33 dan 34 Tahun 1964, kesan ini sangat menghambat hubungan antara masyarakat dengan pihak PT Jasa Raharja (Persero) dan Kepolisian Lalu Lintas.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Tanggung jawab Perusahaan PT. Jasa Raharja (Persero) sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-undang No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu lintas.

Didalam pelaksanaan penyaluran santunan jasa raharja kepada korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya, PT Jasa Raharja (Persero) bekerja sama dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia. Kerjasama tersebut dituangkan dalam nota Perjanjian kerjasama, sesuai Keputusan Bersama antara Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero) No. Pol. : 18/IV/IV/2004 dan Nomor : SKEB/06/IV/2004 tanggal 22 April tahun 2004 di Jakarta, tentang Petunjuk pelaksanaan bersama peningkatan pelayanan santunan korban kecelakaan lalu lintas, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan Undang-undang No. 33 Tahun 1964 dan Undang-undang No. 34 Tahun 1964 dan penanganan keselamatan lalu lintas.

2. Saran

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

a. Bagi pihak jasa raharja

- Berdasarkan dari hasil uraian di atas pihak jasa raharja seharusnya pihak jasa raharja harus lebih sering melakukan sosialisasi dalam

bentuk langsung maupun dari publikasi media cetak ataupun elektronik, sehingga beranggapan bahwa PT Jasa Raharja (persero) sangat baik dan solid Sehingga tujuan PT Jasa Raharja (Persero) bukan hanya sebagai pertanggung jawaban sosial secara mutlak tetapi perlu juga di cermati dampak sosial masyarakat yang memperjuangkan kehidupannya berkaitan dengan ekonomi yang semakin sulit dewasa ini.

- Berdasarkan dari kasus kecelakaan yang di alami para korban seharusnya pihak jasa raharja Seharusnya korban mendapatkan pelayanan yang tidak berbelit-belit atau petugas jasa raharja membantu korban dengan tulus agar tercapainya tujuan dari jasa raharja yang tepat sasaran.

b. Bagi masyarakat

- Masyarakat perlu lebih berusaha untuk mencari tahu tentang asuransi kecelakaan Jasa Raharja agar kedepannya masyarakat mampu untuk memahami proses-proses yang ada dalam pengajuan klaim jasa raharja.
- Perlu adanya identitas yang jelas bagi para korban kecelakaan lalu lintas agar penyaluran santunan jasa raharja tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Kadir Muhammad. 1978. *Pokok-pokok Hukum Asuransi*. PT Citra Aditya bhakti. Bandung
- , 2006. *Hukum Asuransi Indonesia*. PT Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Agus Prawoto. 2003. *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk BaseCapital (RBC)*. Yogyakarta
- Burhan Ashofa. 2010. *Sasaran Kajian Pendekatan Kuantitatif*. Bandung: Op
- Dessy Danarti. 2011. *Jurus Pintar Asuransi*. Yogyakarta: Sigma
- Djoko Prakoso. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Dr. A Junaedi Genny. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak. 1980. *Hukum Asuransi, Seksi Hukum Dagang*. Yogyakarta
- , 1980. *Pertanggungungan dan Perkembangannya*. Yogyakarta
- Ferdinand Silalahi. 1997. *Manajemen Risiko dan Asuransi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- H. Abbas Salim. 1993. *Dasar-dasar Asuransi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- , 1998. *Asuransi dan Manajemen Resiko*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- HMN. Purwosutjipto. 1996. *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- , 1987. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Jimly Asshiddiqie. 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya diIndonesia*. Jakarta
- M. VanBarneveld. 1980. *Pengetahuan Umum Asuransi*. Jakarta: Karya Aksara

- Piter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- PT Jasa Raharja (Persero). 2000, *Sejarah Perkembangan PT Jasa Raharja (Persero)*. Jakarta
- , 2001. *Dalam Perlindungan Prima dalam Pelayanan*. Jakarta
- , 2001, *Pedoman Penyelesaian Santunan Jasa Raharja*, Jakarta
- Sri Redjeki Hartono. 1995. *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wirjono Projodikuro. 1979. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Bandung
- Zainudin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana kecelakaan Lalu Lintas Jalan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

INTERNET

- <http://ahmadsopyan.wordpress.com> Diakses tanggal 08 Desember 2012
- <http://nuepoel.wordpress.com> Diakses tanggal 09 Desember 2012
- <http://www1.surya.co.id/v2?p=7731> Diakses tanggal 15 Desember 2012

